

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokrasi memiliki ciri yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun dalam partisipasi politik, aspek penting dari sebuah demokrasi yaitu adanya partisipasi politik. Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan publik (public policy) merupakan bentuk dari sebuah partisipasi politik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya.

Realitas politik di banyak negara termasuk Indonesia harus melibatkan semua kalangan termasuk wanita, namun terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan. Pentingnya perempuan dalam dunia politik karena memiliki andil dalam menentukan nasib dirinya sendiri melalui keputusan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan kontitusi Negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, meski demikian profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, karena persepsi yang melakat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki.¹

Secara umum partisipasi berarti mengambil bagian dari suatu tahap atau lebih dari suatu proses adapun proses yang dimaksud tentu saja proses pembangunan. Sedangkan konsep partisipasi menurut Pamuji dalam Dawy mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi, di mana tingkat

¹ Riski priandi, Kholis roisah, “Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di indonesia”. (2019) Vol 1 No 1.

kemampuan dan pendidikan turut mempengaruhi sikap dan cara seseorang berperilaku.

Partisipasi perempuan dalam politik mencerminkan masih kentalnya ideologi patriarki di mana keikutsertaan perempuan dalam partai politik atau kedudukan di parlemen merupakan dominan laki-laki. Berdasarkan yang dilekatkan pada perempuan dalam ideologi patriarki mempertegas bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Argumentasi-argumentasi itu menjadi alasan yang signifikan menolak perempuan menduduki jabatan strategis di lembaga politik formal dan kepemimpinan perempuan sulit mendapat pengakuan di ranah politik.²

Partisipasi perempuan dalam politik pada prinsipnya merupakan perjuangan perempuan untuk memperoleh Partisipasi perempuan dalam politik pada prinsipnya merupakan perjuangan perempuan untuk memperoleh jumlah wakil yang memadai mengingat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan sehingga jumlah perempuan dalam politik masih dianggap sangat kecil. Padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan ini sangat penting untuk dapat terwakili dalam lembaga politik, untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis.³

Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu mempertahankan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30%.

² Siiti Habibah. "Partisipasi dan perempuan dalam partai politik". (2015). Vol 8. No 2.

³ Choldi Eka Anggraini, Joko Sutarso, Budi Santoso. "Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan dalam Partai Politik". (2014). Vol 4. No 2.

⁴Perempuan dalam politik di Indonesia di latar belakang oleh reaksi keperempuannya, yang pada awalnya menghadapi berbagai kendala.

Peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau disektor-sektor strategis pengambilan keputusan/kebijakan dan pembuatan hukum formal. Misalnya dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), anggapan masyarakat Indonesia terhadap pilihan perempuan politik masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Pembuktian atas asumsi tersebut dapat di lihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak di lakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995. Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan mahluk yang lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia politik yang begitu keras.

Partai politik, untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik diperlukan sebuah wadah yaitu partai politik. Partai politik merupakan sarana setiap orang terjun pada dunia partai politik. Sigmund Neuman dalam Budiardjo, memberikan definisi partai politik sebuah organisasi artikulatif yang didalamnya terdapat pelaku-pelaku politik yang aktif di masyarakat. Pelaku-pelaku politik tersebut memusatkan perhatian terhadap penguasaan kekuasaan pemerintahan dan mencari dukungan rakyat. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Di negara demokrasi partai relatif menjadi wadah untuk warga negara berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 6 ayat I, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁵ Siiti Habibah. *"Partisipasi dan perempuan dalam partai politik"*. (2015). Vol 8. No 2.

Permasalahan perempuan dan partai politik merupakan persoalan yang sangat kompleks, perempuan yang berada pada dua dunia sekaligus (privat dan publik) memang memiliki beban yang lebih besar. Tidak jarang perempuan justru mengorbankan sisi kehidupan pribadinya demi perjuangan kesetaraan bagi kaumnya sendiri. Perempuan harus menyadari dan mampu mengatasi kendala-kendala yang umumnya muncul ketika mereka hendak terlibat aktif di dunia politik.

Kepemimpinan perempuan dalam ranah politik dan perspektif Hukum Islam menjadi polemik. Hal ini menjadi sesuatu yang sulit untuk didiskusikan antara individu yang membuat menjadi isu yang marginal dan individual yang melegalkannya. Pendapat para fuqaha (ahli fikih) bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi presiden, atau yang lazim disebut dalam bahasa agamanya adalah raisul jumphuriyah atau sulthan atau imam atau waliyul-amri. Keinginan beberapa bagian dari komponen bangsa tersebut, juga untuk memperjuangkan formalisasi syariat dalam hukum positif di Indonesia. Mereka beralasan, karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, juga sebagai tanggung jawab kelak di hadapan Allah SWT. Tentunya dalam setiap langkah, bahwa pertimbangan ukhrawi tidak bisa diabaikan dalam pengambilan sikap yang akan menentukan urusan duniawi.⁶

Di lain lain Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran Taklif (pembenan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi insaniyah (kemanusiaan) nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada perbedaan.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa minimnya jumlah partisipasi perempuan di parlemen. perempuan itu sendiri yang telah dipinggirkan dari sejak awal perkembangan perempuan. perempuan posisinya yang selalu dibuat

⁶ Darjat gunawan. "Kedudukan perempuan dalam politik perspektif fiqh siyasah". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 2021.

tergantung pada laki-laki dianggap masih patriaki, tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan besar yang dianggap sebagai laki-laki, apalagi dalam masalah politik yang penuh seolah-olah hanya laki-laki yang bisa terjun ke dunia ranah politik.

Dalam rangka untuk mengetahui bagaimana Peran Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik pada Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon. maka perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk penelitian akan bertempat di Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia di Kota Cirebon.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas dapat maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan pada tiga hal berikut :

- a. Wilayah kajian penelitian ini adalah Hukum Tata Usaha Negara. Topik kajian Partai Politik dan Pemilu. Objek yang menjadi penelitian ini adalah di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon.
- b. Pendekatan Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
- c. Jenis Masalah Jenis masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu mengenai, Bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam praktek dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik (Studi kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Peran Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Cirebon?
3. Bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Partisipasi perempuan dalam Partai Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap ke depannya dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dapat dipaparkan dalam uraian di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam memahami dan mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya partisipasi perempuan dalam partai politik.
 - b. Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik khususnya untuk peneliti Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kota Cirebon.
2. Manfaat Praktis

- a. Mendapatkan pemahaman dan juga pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bentuk partisipasi perempuan dalam partai politik di Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) di Kota Cirebon.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil objek penelitian serupa.

E. Literatur Riview

Penelitian terdahulu atau yang disebut dengan literatur review mengungkap karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, literatur review bertujuan untuk mengecek penelitian yang akan dilakukan. Pernah di teliti atau belum di teliti oleh orang lain, bukan hanya untuk menghindari plagiat dan pengulangan penelitian tentang masalah yang sama tetapi juga bentuk kesiapan peneliti dalam teori-teori yang digunakan untuk menguasai sumber yang relevansi.

1. Hasil Penelitian dari Siti Habibah dengan judul “Partisipasi dan perempuan dalam kaum perempuan dalam partai politik”. Penelitian ini membahas tentang partisipasi dan perempuan dalam partai politik. Metode yang digunakan dalam peniliti ini menggunakan meode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Partisipasi perempuan dalam partai politik sangat tinggi baik dalam kepengurusan, pertemuan organisasi, pemberian suara, kampanye, diskusi-diskusi politik, dan rapat-rapat umum yang selama ini banyak dilakukan oleh partai politik yang ada. Namun permasalahan dasar politik perempuan adalah ketidakadilan yang lahir akibat adanya kesenjangan yang terjadi antara hak politik perempuan dan peran serta posisi politiknya dengan hak politik dan peran politik laki-laki. Adapun peran perempuan dalam partai politik yaitu selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kepengurusan. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Partisipasi dan peran dalam partai politik. Akan tetapi penelitian terdahulu di atas tidak meninjau permasalahan dalam dalam jumlah peserta

laki-laki didalam partai politik dominan ketimbang perempuan, sedangkan penulis meninjau permasalahan dalam jumlah peserta laki-laki didalam partai politik dominan ketimbang perempuan.⁷

2. Lalu kemudian literatur selanjutnya yaitu hasil analisis dari penelitian Ali Roho Talahu dengan judul “Partisipasi politik kaum perempuan dalam pemilu legislatif di kecamatan ambalau kabupaten baru selatan”. Penelitian ini membahas tentang partisipasi, politik, kaum perempuan pemilu legislatif. Metode yang digunakan dalam peniliti ini menggunakan meode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik di kota Cirebon, untuk mengetahui perempuan dalam partisipasi politik. Bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam pemilihan umum, hak pilihnya yang di pergunkan telah di atur oleh peraturan undang-undang, dan keterlibatan perempuan dalam memberikan hak suaranya masih di dominansi oleh pihak kaum laki-laki. Di satu sisi perempuan adalah kaum yang sangat dihargai, dohormati dan di lindungi. Kaum perempuan diberikan ke istimewaan secara finansial dan sangat di muliakan dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun di sisi lain, namun hal itu secara menempatkan posisi perempuan di ranah domestik. Penempatan itulah yang sangat dijadikan alasan bagi kaum laki-laki untuk menghambat kiprah perempuan diranah publik dalam hal ini dibidang politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan.⁸
3. Hasil penelitian dari Muhammad hanif mauludin mengenai “Analisis fiqih siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif dalam pemilu 2019”. Penelitian yang digunakan dalam penelitian

⁷ Siti habibah. “Partisipasi dan perempuan dalam partai politik”. (2015). Vol 8. No 2.

⁸ Ali roho tholahu, “Partisipasi polititik kaum perempuan dalam pemilu legislatif di kecamatan ambalau kabupaten baru selatan”. (2021). Vol 2087 No 8950.

ini adalah deskriptif kualitatif, yakni metode penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasar, dimana pada umumnya metode ini diartikan secara luas yaitu bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena, melainkan juga mengupayakan menerangkan hubungan-hubungan, menguji hipotesis, memperkuat prediksi, serta mendapatkan makna dan komplikasi dari permasalahan yang hendak dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran Taklif (pembenan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi insaniyah (kemanusiaan) nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada perbedaan, Menurut Fiqh siyasah untuk keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif, diantara ulama itu adalah Ibnu Hazm, dia berkata: Boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan.⁹

4. Hasil penelitian dari Muhammad Lusi Renhoat dengan judul “Peran perempuan dalam partai politik (suatu kajian komunikasi politik pada partai demokrat di kota tual)”. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni metode penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat hubungan antara yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasar dimana pada umumnya metode ini

⁹ Muhammad hanif mauludin. “Analisis fiqh siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif dalam pemilu”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018.

diartikan secara luas yaitu bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena, melainkan juga mengiayayakan menerangkan hubungan-hubungan, menguji hipotesis, memperkuat prediksi, serta mendapatkan makna dan komplikasi dari permasalahan yang hendak dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permempuan tidak banyak terlibat dalam struktur

5. Partai politik ataupun menjadi anggota legislatif. Selanjutnya perempuan, bisa diklasifikasikan menjadi perempuan sebagai politisi, perempuan sebagai seseorang profesional dan perempuan sebagai aktivis. Perlu pula ditegaskan bahwa peningkatan peran perempuan dalam komunikasi politik jangan hanya dilihat dari peningkatan jumlah perempuan yang aktif dalam kepengurusan partai politik ataupun terpilih sebagai anggota legislatif, tetapi juga harus dinilai dari meningkatnya ke efektifan dan dampak nyata yang mereka hasilkan, yang bisa dinilai dari cara perempuan menciptakan berbagai perubahan dalam tata peraturan kelembagaan, norma-norma dan praktik dan keadilan serta meningkatnya hak-hak bagi semua perempuan untuk ketidakadilan perempuan serta meningkatkan taraf hidup perempuan pada umumnya.¹⁰

F. Kerangka Pemikiran

Memasuki pembahasan kerangka pemikiran, penulis ingin mulai dari pembahasan terkait yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Partisipasi Perempuan Dalam Partai politik. Terhadap partisipasi perempuan dalam partai politik pada komisi pemilihan umum. Perempuan dan partai politik adalah masalah utama yang diangkat, untuk kemudian penulis mempertajam kembali dengan cara menyesuaikan masalah utama tersebut pada wilayah kajian penelitian Hukum Tata Usaha Negara Studi langsung di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam

¹⁰ Muhammad Lusi Renhoat "Peran perempuan dalam partai politik" (Skripsi Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negri Ambon 2020).

sejarah Indonesia. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau disektor-sektor strategis pengambilan keputusan/kebijakan dan pembuatan hukum formal. Misalnya dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), anggapan masyarakat Indonesia terhadap pilihan perempuan politik masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Pembuktian atas asumsi tersebut dapat di lihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak di lakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995. Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan mahluk yang lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia politik yang begitu keras.

Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu mempertahankan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota, Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30%. ¹¹Perempuan dalam politik di Indonesia di latar belakang oleh reaksi keperempuanannya, yang pada awalnya menghadapi berbagai kendala. ¹²

Partisipasi merupakan bagian dari suatu tahap lebih dari proses. Adapun proses yang dimaksud tentu saja proses pembangunan. Sedangkan konsep partisipasi menurut pamuji mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, prespesi dan sistem komunikasi dimana tingkat kemampuan dan pendidikan turut mempengaruhi sikap dan cara seseorang berperilaku. Secara etimologis, menurut surbakti partisipasi berarti ikut ambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi dirinya.

¹² Siti Habibah. "Partisipasi dan perempuan dalam partai politik". (2015). Vol 8. No 2.

Partisipasi pada hakikatnya dapat terjadi di setiap tahap kegiatan manusia. Partisipasi dapat terjadi ditahap perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi dan pengelolaan kegiatan lebih lanjut. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Partai politik merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyak yang telah terorganisir dan anggota-anggotanya yang memiliki cita-cita dan tujuan. Partai politik ini berusaha untuk merebut dukungan rakyat, bertujuan memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan jalan yang menempatkan anggota-anggotanya di dalam jabatan-jabatan politik atau pemerintahan.¹³

Dalam kegiatan pemilihan atau pemilu, partai politik sangat berperan dan berpartisipasi aktif sebagai pemilik calon-calon legislator dan atau pimpinan eksekutif. Sebagai agen partisipasi politik, partai politik haruslah menyediakan orang-orang terbaik yang akan duduk sebagai pihak yang terlibat dalam (pembuat kebijakan). Disinilah peran kehadiran parpol menjadi penting dalam setiap kali pemilu. Kader-kader terbaik di parpol diajukan sebagai calon-calon pemimpin bangsa untuk bertarung dengan calon dari partai politik lainnya. Untuk konteks Indonesia sampai saat ini hanya partai politik yang memiliki keabsahan untuk mencalonkan seseorang dalam pemilu. Walaupun ada wacana pencalonan secara independen tanpa parpol, penulis rasa masih sangat sulit dilaksanakan sekarang ini, sebab ada beberapa hal penting yang tidak dikuasai dan bahkan tidak dimiliki oleh calon independen.¹⁴

Sejumlah partai politik memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tetapi lebih banyak yang

¹³ Muhammad Lusi Renhoat "Pera perempuan dalam partai politik" (Skripsi Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negri Ambon 2020).

¹⁴ Ali roho tholahu. "*Partisipasi polititik kaum perempuan dalam pemilu legislatif di kecamatan ambalau kabupaten baru selatan*". (2021). Vol 2087 No 8950.

memberi peran figuran untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang perempuan lebih kurang ditempatkan pada posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan konsumsi, dan kesenian. Dalam partisipasi perempuan terhadap partai politik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam partisipasi perempuan dalam partai politik sulit dielakan. Soal kualitas calon perempuan masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menempa kader-kader perempuan yang dimiliki untuk ditampilkan sebagai wakil rakyat yang cerdas, dan cekatan mampu menangkap aspirasi rakyat dan paham dinamika politik.

Menurut any mahmunah, terdapat beberapa faktor yang membuat paartisipasi politik perempuan masih rendah yaitu dari pasrtai itu sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan perempuan dan kemandirian perempuan dalam hal materi.

1. Faktor pendorong perempuan

Beberapa faktor yang mendorong perempuan terjun didunia politik diantaranya adalah kebijakan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan peremuan dalam dunia perpolrikan tanah air khususnya melalui pemilu legislatif. Contoh yang terakhir tentu UU No. 5 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana pada pasal 55 menyebutkan kuota minimal 30% perempuan bagi partai politik. Hal itulah yang kemudian endorong semakin banyaknya perempuan yang ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan.

2. Faktor penghambat perempuan

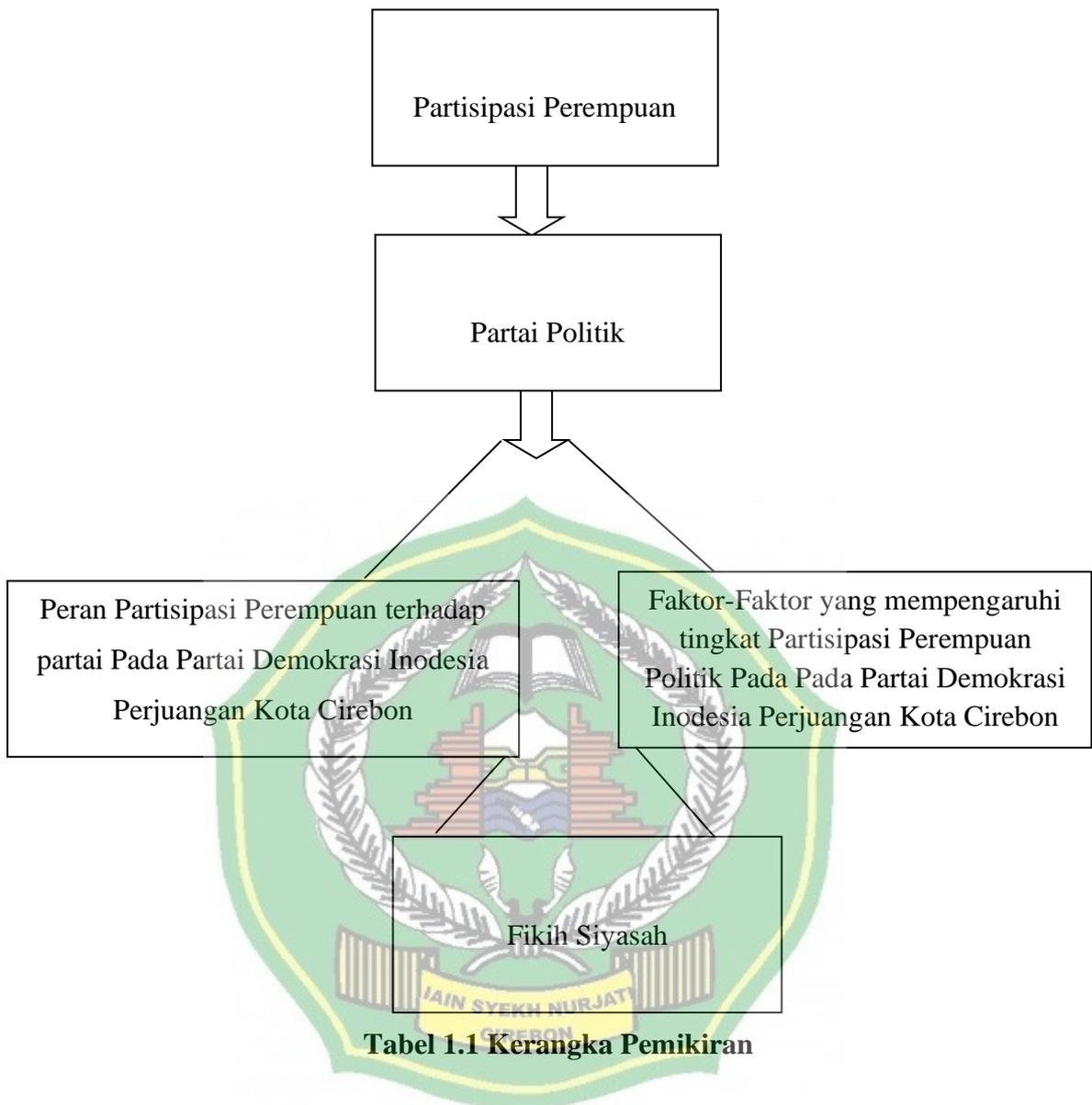
Minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini. Budaya patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Budaya ini menganggap perempuan lemah dan lebih

memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dengan kondisi seperti ini, maka kemampuan finansial kaum perempuan juga menjadi terbatas.¹⁵

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebgai berikut :



¹⁵ Totok irwantoro “*Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif DPRD kabupaten mojekrto*”. (2014) .



G. Metodologi Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu penelitian dikerjakan oleh penulis. Dengan adanya desain penelitian memudahkan peneliti untuk dapat berada secara langsung dengan cara mengamati, menganalisis, mencatat dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi lapangan dari penelitian tersebut. Desain penelitian yang dirancang dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif.

Metode menurut senn, merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian

ini adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terdapat pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁶ Jadi, metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan langkah-langkah sistematis.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena lebih menekankan pada proses penafsiran seorang peneliti terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, yang dalam pengumpulan datanya akan lebih membutuhkan berbagai informasi kualitatif dari pada data yang berupa statistik atau kuantitatif. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kualifikasi yang terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisi, kemudian di interpretasikan.¹⁷

Penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian dimana peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Sedangkan dalam proses analisis datanya penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan induktif, artinya penelitian tidak mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau penolakan, namun mencari fakta-fakta yang beragam, fakta-fakta tersebut selanjutnya ditelaah dan akan dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti. Dalam peneliti ini akan menganalisis “Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik” (Studi kasus pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon). Subyek penelitian ini adalah Pegawai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon.

¹⁶ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*....,12.

¹⁷ Albi Anggota dan Johan setiawan, “*Metodologi penelitian kualitatif*,” (Jawa Barat:CV Jejak, 2018).

2. Tempat penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan mengunjungi salah satu tempat yang ditemukan permasalahannya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon.

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek atau objek penelitian di mana darinya akan diperoleh data. ¹⁸Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna di balik data yang diamati. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang pertama yang ada di lapangan. Dari subjek atau objek penelitianlah data langsung diambil.

¹⁹ Maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara kepada pegawai Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Cirebon.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data keduan sebagai pelengkap sumber data primer. Dapat diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan data yang diperoleh melalui sumber primer. ²⁰Maka sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berasal dari jurnal, artikel, dan sumber data lainnya yang dapat menambahkan kekurangan dari data primer, ataupun dalam penelitian ini tambahan bisa datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon

¹⁸ Johni Dimiyati, "*Metodologi penelitian pendidikan dan aplikasinya pada pendidikan usia dini*". (PAUD), (Jakarta : Kencana, 2013),39.

¹⁹ Johni Dimiyati, "*Metodologi penelitian pendidikan dan aplikasinya pada pendidikan usia dini*". (PAUD), (Jakarta : Kencana, 2013),39.

²⁰ Johni Dimiyati, "*Metodologi penelitian pendidikan dan aplikasinya pada pendidikan usia dini*". (PAUD), (Jakarta : Kencana, 2013),40.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data penelitian dengan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan adanya observasi, karena dalam penelitian kualitatif adalah proses naturalistik peneliti terhadap apa yang terjadi di sekitar, agar peneliti dapat merasakannya secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan dengan melalui tatap muka dengan responden/orang yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.²¹ Dalam penelitian ini diperlukan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang detail dan terperinci berupa kata-kata dan kalimat pernyataan langsung dari objek penelitian. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data apa yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan menghimpun data lewat peninggalan tertulis, biasanya berbentuk arsip tidak terkecuali mengenai pendapat teori, dalil hukum-hukum serta bidang hal lainnya yang berkorelasi dengan persoalan penelitian.

5. Teknik analisis data

Secara umum menurut Neuman, analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, atau badan pengetahuan. Sekali suatu pola itu diidentifikasi, pola itu diinterpretasi ke dalam kisah-kisah teori sosial atau latar dimana teori sosial itu terjadi. Analisis data mencakup menguji, menyortir, mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mensintesis, dan merenungkan data yang

²¹ Johni Dimiyati, "Metodologi penelitian pendidikan dan aplikasinya pada pendidikan usia dini". (PAUD), (Jakarta : Kencana, 2013),68.

direkam juga meninjau kembali data mentah dan terekam. ²²Analisi data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkup subjek objek penelitian. ²³Adapun proses analisisnya sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Proses berfikir secara mendalam yang memerlukan wawasan yang luas. Mereduksi yaitu yang luas. Mereduksi yaitu merangkum dan memilih hal-hal penting dan dicari polanya. Data yang sudah di rangkum mempermudah peneliti dalam pengumpulan data dan memberikan gambaran yang jelas.

b. Penyajian Data

Dari data yang di dapat berikutnya dilakukan pengembangan kedalam teks naratif hingga berupa serangkaian informasi yang selaras dengan persoalan penelitian. Berikutnya peneliti menginterpretasi data menurut susunan narasi serta data penunjang lain. ²⁴ Setelah melakukan reduksi data, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa ringkasan uraian, bagan, hubungan antara kategori ataupun lainnya. Melalui data tersebut akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, kemudian membuat rencana kerja selanjutnya berdasarkan pemahamannya. Dalam peneliti ini penyajian datanya menggunakan cara deskripsi dari semua kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan membuat deskripsi dari hasil penelitian. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah uraian dan gambar-gambar dari awal proses sampai hasil yang ditemukan oleh peneliti.

c. Kesimpulan

Kesimpulan ialah tahap paling akhir dalam memberikan jawaban pertanyaan yang di ajukan dari awal penelitian kualitatif, namun penelitian kualitatif sifatnya masih sementara serta hendak dibuka kembali ketika langsung ke riset serta lapangan. Pentingnya inferensi pada riset kualitatif

²² Rulam Ahmadi, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 229-230.

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif".....,236

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif".....,249.

ialah bahwa konklusi awal ditarik sifatnya masih sementara serta dapat mengalami perubahan kecuali dijumpai bukti yang kuat dalam menunjang tahap pengumpulan data selanjutnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian dengan sistematika sebagai berikut.

1. Bab Kesatu : Pendahuluan

Bab ini menggambarkan isi bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang sejarah partai politik di Indonesia, dasar hukum partai politik, mekanisme partai politik pada pemilihan umum. Serta partisipasi politik, partisipasi politik perempuan, dan partai politik.

3. Bab Ketiga : Pembahasan

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum tentang profil, Petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon visi, misi dan struktur organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon.

4. Bab Keempat : Analisis

Bab ini berisi hasil penelitian melalui pembahasan, meliputi deskripsi analisis, hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terkait analisis materi.

5. Bab Kelima : Penutup

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.